

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
BULAN JANUARI TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkjp_jogja@yahoo.com dan bbkjp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKJP (<http://bbkjp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan Januari Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan Januari Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 1 Februari 2024
Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,
KARET DAN PLASTIK
BULAN FEBRUARI TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkkp_jogja@yahoo.com dan bbkkp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKKP (<http://bbkkp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan Februari Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan Februari Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 1 Maret 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,
KARET DAN PLASTIK
BULAN MARET TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkkp_jogja@yahoo.com dan bbkkp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKKP (<http://bbkkp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan Maret Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan Maret Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 1 April 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,
KARET DAN PLASTIK
BULAN APRIL TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkkp_jogja@yahoo.com dan bbkkp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKKP (<http://bbkkp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan April Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan April Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 2 Mei 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,
KARET DAN PLASTIK
BULAN MEI TAHUN 2024**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkjp_jogja@yahoo.com dan bbkjp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKJP (<http://bbkjp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan Mei Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan April Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 3 Juni 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,
KARET DAN PLASTIK
BULAN JUNI TAHUN 2024**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkjp_jogja@yahoo.com dan bbkjp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKJP (<http://bbkjp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan Juni Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan April Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 1 Juli 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,
KARET DAN PLASTIK
BULAN JULI TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkjp_jogja@yahoo.com dan bbkjp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKJP (<http://bbkjp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan Juli Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan April Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,
KARET DAN PLASTIK
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkjp_jogja@yahoo.com dan bbkjp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKJP (<http://bbkjp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan Agustus Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan April Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 2 September 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,
KARET DAN PLASTIK
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkjp_jogja@yahoo.com dan bbkjp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKJP (<http://bbkjp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan September Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan April Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 1 Oktober 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,
KARET DAN PLASTIK
BULAN OKTOBER TAHUN 2024**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkjp_jogja@yahoo.com dan bbkjp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKJP (<http://bbkjp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan Oktober Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan April Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 1 November 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,
KARET DAN PLASTIK
BULAN NOVEMBER TAHUN 2024**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkjp_jogja@yahoo.com dan bbkjp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKJP (<http://bbkjp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan November Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan April Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,
KARET DAN PLASTIK
BULAN DESEMBER TAHUN 2024**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik *terdapat* sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui :

- a. Kotak Pengaduan;
- b. Email (bbkjp_jogja@yahoo.com dan bbkjp_jogja@kemenperin.go.id);
- c. Web BBKJP (<http://bbkjp.kemenperin.go.id/page/pengaduan-masyarakat>).

Selama Bulan Desember Tahun 2024, sebanyak 0 (tidak ada).pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut di atas. Sebanyak 0 pengaduan telah selesai ditindaklanjuti, 0 pengaduan masih dalam proses, dan 0 pengaduan belum ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan lainnya | : 0 aduan |

Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas karena tidak ada aduan yang masuk.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik selama Bulan April Tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.

